

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial adalah alat komunikasi dua arah, yang mana membuat para penggunanya semakin mampu untuk menggali dan memberikan informasi – informasi lebih dalam terutama dalam dunia politik dan pandangan – pandangan dengan tujuan untuk mempersuasi para pengguna sosial media (Pratama & Yahya, 2023). Di tengah masyarakat Indonesia, media sosial kini merupakan kebutuhan pokok, di mana sebagian besar penduduknya telah memiliki akun di platform tersebut, dan tidak jarang seseorang mengelola beberapa akun untuk digunakan sekaligus (Novian & Rusmono, 2021). Data resmi yang diberikan dari Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo, 2020) menegaskan dalam laporannya, dengan mencatat bahwasannya dari populasi total yang ada di Indonesia yang mencapai 266,9 juta jiwa, sebanyak 196,7 juta jiwa penduduk aktif yang terlibat di media sosial, yang setara dengan 73,7% dari keseluruhan penduduk, dan angka ini mungkin akan meningkat 8,8% dibandingkan tahun 2019.

Media sosial dapat memberikan kemudahan akses terhadap bermacam berita terutama politik, ia mampu meberikan pengguna media sosial untuk mengakses informasi seperti berita politik, kampanye, diskusi politik, yang mana hal tersebut memungkinkan masyarakat maupun generasi muda, dapat terlibat aktif dalam perkembangan informasi maupun isu-isu politik yang sedang viral.

Terkadang, dari informasi-informasi yang tersebar di media sosial ini lah masyarakat akan mempertimbangkan dalam membuat keputusan, termasuk keputusan politik itu sendiri.

Media sosial memiliki beberapa karakteristik yang cukup unik, dimana interaktivitasnya yang sangat intens, perannya dalam pembentukan jati diri penggunanya, serta kemudahannya dalam berbagi konten di dalam berbagai komunitas yang dapat terus berkembang. (Ismail & Sari, 2019) mendeskripsikan bentuk dari situs jejaring sosial (SNS) sebagai penghubung antarindividu melalui teknologi digital, yang memungkinkan komunikasi dilakukan dengan berbagai macam bentuk media sosial. Kemajuan dalam ekosistem media sosial ini dapat ditandai dengan berbagai macam pembentukan serta terciptanya situs-situs terbaru. Banyak diantaranya yang secara khusus dirancang untuk dapat mengakomodasikan perkembangan sistem komunikasi secara seluler, yaitu untuk melayani para pengguna ponsel pintar dan tablet. Sifat dinamis dan terus berevolusi dari teknologi, hal inilah yang telah mendorong populeritasnya media sosial hingga ke berbagai penjuru dunia, dimana mayoritas populasi global masa kini telah menjadi penggunanya (Lipschultz, 2015).

Kecenderungan bagi generasi muda dalam memanfaatkan media sosial lebih banya untuk terfokus dalam fungsi hiburan. Mereka cenderung merasa kurang nyaman untuk mengekspresikan pandangan politik maupun terlibat dalam berbagai isu-isu politik dari platform media sosial (Prakoso dkk., 2024).

Dalam kehidupan nyata generasi muda lebih suka berbicara mengenai politik bersama orang-orang terdekatnya, mereka akan mengikuti isu politik dengan teman sebayanya apabila isu-isu tersebut menjadi viral ataupun setelah mengikuti seminar ataupun kajian berbasis politik (Dwitama et al., 2022).

Adapun dalam bermedia sosial, masyarakat Indonesia tidak lagi dibatasi oleh hal-hal tersebut dikarenakan mereka mampu mengakses informasi dari isu-isu tersebut dan berargumen dengan bebas, sehingga kesadaran dan sikap politik kaum muda juga tetap aktif walaupun dalam bermedia sosial (Dania & Nisa, 2023). Dengan demikian pengaruh politik tetap memberikan dampak baik itu di media sosial maupun lingkungan sekitar.

Media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok dan media online lainnya sangat sering digunakan di era modern saat ini, terlebih lagi oleh generasi muda. Saat ini media sosial sering kali dijadikan sebuah ajang dalam berkampanye oleh partisipan politik baik itu dalam tingkat pemilihan umum, maupun dalam tingkat pemilihan kepala daerah (Arighi et, dkk, 2024). Sehingga hal ini seringkali menyebabkan berbagai macam pertikaian di dalam dunia maya tersebut, tetapi menariknya pertikaian tersebut biasanya akan berakhir pula jikamana pemilu maupun pilkada berakhir. Meski demikian, munculnya kelompok-kelompok yang akan memecah belah pihak ini dengan cara menyebarkan informasi palsu (hoaks) dan isu-isu mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Laksmitha & Susanto, 2019).

Instagram, sebagai salah satu platform media sosial yang sedang sangat populer untuk masa sekarang, mereka dapat menawarkan bermacam-macam fitur yang dapat digunakan untuk menyampaikan bermacam-macam informasi politik. Dengan bermacam-macam fitur seperti visualisasi yang kuat, melalui foto, video, filter, dan bermacam-macam fitur-fitur interaktif lainnya seperti stories, reel, IG TV, dan banyak lagi. Instagram memungkinkan penggunaannya untuk mengakses informasi terutama politik dengan cara yang menarik dan mudah dipahami (Themi & Perdana, 2020).

(Rosadi, dkk 2020) menyatakan bahwasannya media sosial dapat berpotensi menjadi saluran yang efektif untuk mendistribusikan informasi dan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Efektivitas penyampaian informasi tersebut dapat semakin optimal dengan adanya kemudahan akses, yang diperkuat oleh penyajian konten politik dalam kemasan kreatif dan format interaktif yang menarik sehingga pesan tersebut terserap dengan baik (Novian & Rusmono, 2021).

Maka dengan itu dapat diartikan bahwasannya pendidikan literasi politik cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Minimalnya pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu politik dan pemahaman mereka menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap proses demokrasi, juga begitu bagi pemerintah (Pambayun et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman mengenai literasi politik menjadi sebuah kebutuhan mendasar yang harus dikuasai sebagai suatu pengetahuan praktis yang aplikatif dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Literasi politik tidak terlepas dari pemahaman terhadap isu-isu aktual, profil kandidat, dan proses politik, di mana penguasaannya akan sejalan dengan pengembangan etik dalam memproses informasi politik, pemahaman substantif tentang sistem politik, serta pembentukan perilaku politik yang bertanggungjawab (Iswandi & Efendi, 2020).

Di tengah disrupsi informasi saat ini di era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*, literasi politik muncul untuk dapat mendesak individu agar dapat mengeluarkan kompetensinya. Kemampuan ini menjadi krusial untuk menyikapi berbagai fenomena politik, terutama mengingat keraguan terhadap validitas dan nilai kebenaran dari informasi yang beredar. Kondisi ini menciptakan tantangan konkret bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam memproses dan menanggapi berbagai informasi politik yang mereka temui di ruang digital.

Berdasarkan sintesis dari dua studi utama, yaitu dari artikel (Lailiyah, dkk., 2018) dalam artikelnya yang berjudul "*Youthizen, Political Literacy, and Social Media*" dan (Shahreza, 2017) dalam artikelnya yang berjudul 'Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi', dapat disimpulkan bahwa literasi politik mencakup tiga dimensi fundamental.

Pertama, aspek kognitif, yang mengevaluasi kapasitas individu dalam memproses dan memanfaatkan informasi politik yang mereka peroleh. Kedua, dimensi afektif yang berkaitan dengan sikap dan respons individu terhadap berbagaimacam isu-isu politik di lingkungannya. Ketiga, aspek behavior yang mengukur kemampuan mengekspresikan

pemahaman politik dalam bentuk tindakan nyata. Lebih lanjut lagi, peran media sosial dinilai signifikan terhadap pengembangan ketiga aspek literasi politik ini. Fakta yang memperkuat hal ini adalah bahwa 80% pengguna media sosial di Indonesia berasal dari generasi muda berusia 20-29 tahun, yang menjadikan media sosial menjadi platform strategis untuk mengembangkan literasi politik (Wati, 2020).

Berdasarkan perspektif keilmuan, kajian ilmu politik dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari sistem politik dan dinamika kepolitikan yang mengatur tata kehidupan yang kolektif di masyarakat, dengan melakukan analisis komparatif terhadap praktik-praktik politik masa lampau (Salasa, 2015). Pada intinya, esensi ilmu politik terletak pada pendalaman mengenai hubungan simbiosis antara pemilih dan yang dipilih, yang termanifestasi dalam proses demokratis seperti Pemilu dan Pilkada, dimana pemenuhan hak pilih warga negara merupakan imperatif yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab (Indrawa, dkk., 2021).

Partisipasi politik dari generasi muda di Indonesia masih terlihat cukup kurang terlihat, hal ini dikarenakan banyak dari generasi muda yang tidak tertarik dengan politik (Saleh, 2017). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan mereka beranggapan bahwa suara mereka tidak akan di dengar oleh pemegang kepentingan atau penguasa dan mereka juga beranggapan bahwasannya politik sendiri adalah dunia dimana korupsi selalu saja terjadi.

Berdasarkan analisis komprehensif yang dilakukan oleh Orb Media terhadap 979.000 responden di 128 negara selama periode 1980-2018, terungkap bahwasannya fenomena paradoksal dimana generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pemerintahan justru menunjukkan kecenderungan untuk menghindari partisipasi politik formal. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kelompok muda ini cenderung bersikap abstain dalam proses elektoral seperti pemilu dan pilkada, sehingga dikategorikan sebagai pemilih pasif. Sebagai alternatif, mereka lebih memilih bentuk ekspresi politik non-institusional melalui aksi unjuk rasa dan demonstrasi ruang publik (Imaddudin & Santoso, 2020).

Partisipasi politik generasi muda sangatlah penting bagi kelangsungan hidup negara demokrasi. Pada generasi ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan melalui keterlibatan aktif dalam proses politik. Namun, tingkat partisipasi tradisional, seperti pemungutan suara dan keanggotaan partai politik, menjadi cenderung lebih rendah di kalangan generasi muda. Sebaliknya, partisipasi politik mereka dapat terlihat lebih banyak di ruang digital, terkhususnya di media sosial yang sedang populer saat ini dengan tren populer yang ada (Fajri, dkk., 2024).

Ada banyak sekali cara yang dapat di tempuh agar opini publik dapat terpengaruhi dan hal ini biasanya dilakukan oleh negarawan ataupun pimpinan politik, salah satu alatnya adalah media sosial.

Opini akan dengan mudahnya terbentuk dengan adanya media sosial, sebab media sosial merupakan salah satu pengaruh kuat terhadap kemajuan zaman yang terjadi saat ini. Sudah menjadi bukti nyata bahwa saat ini media sosial memiliki peranan yang sangat luar biasa serta kedepannya menjadi sangat kuat lagi untuk memberikan pengaruhnya (Luthfie et al., 2024). Seseorang pada awalnya bukanlah siapa-siapa, tetapi dengan memanfaatkan penggunaan media yang ada, ia dapat menjadi seseorang yang menjadi dapat dikenal oleh pengguna media sosial lainnya. Kebanyakan media saat ini juga sudah dipenuhi oleh informasi dan isu politik (Rahmadi, dkk., 2020).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, literasi politik merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak dalam menyikapi bermacam-macam fenomena kontemporer. Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya banjir informasi di platform media sosial yang memerlukan proses klarifikasi dan verifikasi secara sistematis terhadap bermacam-macam konten-konten politik yang beredar (Novian & Rusmono, 2021). Fakta menunjukkan bahwasannya media sosial menjadi konsumsi utama generasi muda di dunia digital, dengan instagram sebagai salah satu platform yang paling dominan penggunaannya. Kondisi ini menjadikan generasi muda sebagai sasaran empuk bagi penyebaran hoaks dan informasi provokatif yang berseliweran dalam wacana politik (Lailiyah., 2018)

Instagram adalah sebuah platform media sosial yang cukup populer terlebih lagi bagi generasi muda. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sebuah sumber informasi, penting untuk memahami sejauh mana Instagram dapat berfungsi sebagai alat literasi politik yang cukup efektif (Swastika & Utami, 2020).

Berdasarkan penelitian yang di lakukan (Pambayun et al., 2021) dengan judul “Literasi Politik Pada Wilayah Eks Daerah Tertinggal Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar”, berdasarkan temuan yang ada, penyelenggaraan literasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah eks daerah tertinggal belum dapat berjaan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak efektifnya kedua indikator metode penyampaian informasi, baik secara *synchronous* (langsung) maupun *asynchronous* (tidak langsung). Sebagai daerah yang baru keluar dari status tertinggal pada tahun 2019, fokus kebijakan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, sehingga literasi politik belum menjadi program prioritas. Selain itu, program yang dijalankan Bakesbangpol setempat juga belum bersifat kolaboratif dan tidak dirancang sebagai sistem berkelanjutan, melainkan hanya terbatas pada serangkaian kegiatan yang bersifat ad-hoc untuk menyongsong Pemilu 2019.

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh (Novian & Rusmono, 2021) dalam karyanya yang berjudul “Pengaruh Sosial Media Instagram Terhadap Tingkat Literasi Politik Siswa (Studi Deskriptif Pada Siswa Sma Negeri 3 Batam)”, teridentifikasi bahwa platform Instagram

berperan cukup signifikan sebagai sumber informasi politik utama bagi kalangan siswa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas responden mengandalkan Instagram sebagai media primer dalam mengakses berita dan informasi politik terkini. Temuan lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa akses terhadap informasi politik melalui Instagram turut mendorong perkembangan pengetahuan politik (*political knowledge*) yang lebih komprehensif. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan dampak positif berupa peningkatan partisipasi politik aktif di kalangan siswa, yang merepresentasikan implikasi praktis dari literasi politik yang terbangun secara organik melalui media sosial.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Anshori et al., 2023) dengan judul “Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax”, menemukan bahwa bahwa terdapatnya pengaruh antara literasi politik terhadap pengendalian informasi hoax. Terdapatnya kontribusi positif literasi politik dan pemahaman pemilu dalam pengendalian informasi hoax, dimana H1 diterima dan H0 ditolak dan H2 diterima dan H0 ditolak serta H3 diterima dan H0 ditolak dengan nilai hubungan sebesar 11,2%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Laksmitha & Susanto, 2019) dengan judul “Partisipasi Politik Generasi Milenial di Instagram dalam Pemilu 2019”, terungkap bahwasannya generasi milenial mengembangkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang khas seiring transformasi digital. Media sosial menjadi platform yang dominan digunakan karena menyediakan ruang interaksi yang nyaman dengan tingkat anonimitas yang relatif. Studi ini juga menemukan bahwa Instagram menjadi saluran primer untuk memperoleh informasi politik bagi generasi milenial, sementara diskusi politik substantif justru lebih sering dilakukan secara tatap muka. Pola konsumsi media generasi milenial bersifat komplementer meski menjadikan media sosial sebagai rujukan mereka tetap aktif mencari tahu kebenaran informasi.

Dari berbagai penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai pengaruh literasi politik terhadap generasi muda dalam konteks pemilihan kepala daerah. Maka, studi ini akan membahas mengenai bagaimana literasi politik dari generasi muda dalam konteks pemilihan kepala daerah di kota Batu.

Instagram adalah sebuah platform media sosial yang sangat populer di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, penting untuk memahami sejauh mana Instagram dapat berfungsi sebagai alat literasi politik yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan pribadi generasi muda tentang penggunaan Instagram dalam konteks politik. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam tentang bagaimana informasi politik disebarkan dan diterima, serta bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan politik generasi muda di Kota Batu.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini berfokus untuk melakukan survei kepada sebuah organisasi Karang Taruna di Kota Batu yang masih aktif dengan membahas apakah kualitas keaslian konten politik Kota Batu di Instagram, Melihat apakah Instagram sudah mampu menjadi literasi politik bagi generasi muda Kota Batu dan Apakah generasi muda Kota Batu sendiri mengawasi serta berpartisipasi dalam diskusi politik Instagram.

#### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Penelitian ini juga hanya berfokus terhadap platform Instagram sebagai media sosial yang digunakan untuk menyampaikan isu politik kepada masyarakat. Penelitian ini juga akan berfokus kepada konten politik yang terutama berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan sajian latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi topik penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas informasi politik yang tersedia di Instagram mempengaruhi pemahaman politik generasi muda di kota Batu?
2. Bagaimana peran media sosial Instagram dalam meningkatkan literasi politik generasi muda di Kota Batu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sajian di atas, tujuan penelitian yang bisa di capai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas informasi politik yang ada di Instagram dapat mempengaruhi pemahaman generasi muda.
2. Untuk mengetahui apakah Instagram dapat menjadi sebuah platform untuk mendapatkan dan meningkatkan literasi politik dari generasi muda.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Bagi Peneliti

###### a) Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan:

Peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan media sosial, khususnya Instagram, sebagai media literasi politik. Peneliti juga akan mengembangkan keterampilan dalam metodologi penelitian kualitatif, analisis data, dan penulisan ilmiah.

b) Kontribusi Akademik:

Penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik dalam bidang studi komunikasi, media sosial, dan politik. Hasil penelitian dapat menambah literatur yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

c) Pengalaman Penelitian Lapangan:

Melalui proses pengumpulan data, peneliti akan mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan wawancara, mengelola diskusi kelompok, dan melakukan analisis konten. Pengalaman ini sangat berharga untuk pengembangan karier akademik atau profesional peneliti.

d) Networking dan Kolaborasi:

Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk generasi muda, akademisi, dan praktisi di bidang politik dan media sosial. Ini dapat membuka peluang untuk kolaborasi di masa depan.

2. Manfaat Bagi Pembaca

a) Peningkatan Kesadaran Politik:

Partisipan akan lebih sadar akan peran dan pengaruh media sosial dalam literasi politik mereka. Ini dapat mendorong mereka untuk lebih kritis dan selektif dalam mengonsumsi informasi politik di media sosial.

b) Partisipasi dalam Penelitian:

Dengan berpartisipasi dalam penelitian, subjek dapat memberikan kontribusi langsung pada pemahaman yang lebih baik tentang literasi politik di kalangan generasi muda. Suara dan pengalaman mereka akan dihargai dan diakui dalam penelitian ini.

c) Pengembangan Literasi Media:

Diskusi dan wawancara dalam penelitian ini dapat membantu subjek meningkatkan literasi media mereka, termasuk kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi politik yang mereka temui di Instagram.

d) Kesempatan untuk Berbagi Pengalaman:

Partisipan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang penggunaan media sosial untuk literasi politik. Ini bisa menjadi cara untuk merefleksikan penggunaan media mereka dan meningkatkan pemahaman diri.